



# RESILIENSI OMS DI TENGAH PENYEMPITAN RUANG SIPIL

LAUNCHING CSO SUSTAINABILITY INDEX 2023  
KONSIL LSM INDONESIA  
5 AGUSTUS 2024



# CSO SUSTAINABILITY INDEKS

- ❑ **The Civil Society Organization Sustainability Index (CSOSI) atau Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil adalah laporan yang mengukur perkembangan keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan menggunakan 7 dimensi dan 36 sub dimensi.**
- ❑ **Dikembangkan pertama kali oleh United States Agency for International Development Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance Center of Excellence on Democracy, Human Rights and Governance.**
- ❑ **Dikembangkan di lebih dari 70 negara termasuk Indonesia melalui FHI360 dengan mitra lokal Konsil LSM Indonesia hingga tahun 2021.**
- ❑ **Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia 2023 tidak berhubungan langsung dengan beberapa lembaga di atas. Substansi opini dan penilaian untuk 2023 ini berada di bawah tanggung jawab sepenuhnya tim penulis dan tim panel ahli yang dibentuk.**
- ❑ **Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia 2023 dikerjakan oleh Konsil LSM Indonesia bersama Perkumpulan Lokadaya, dan Yayasan Penabulu atas dukungan European Union melalui Program Co Evolve 2**

# ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

OMS (“Ormas”) adalah: Setiap organisasi, baik formal maupun informal (berbadan hukum atau tidak berbadan hukum), organisasi yang bukan bagian dari aparatur pemerintah, organisasi independen yang tidak mencari keuntungan, organisasi masyarakat yang independen, organisasi yang berbasis keanggotaan dan organisasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

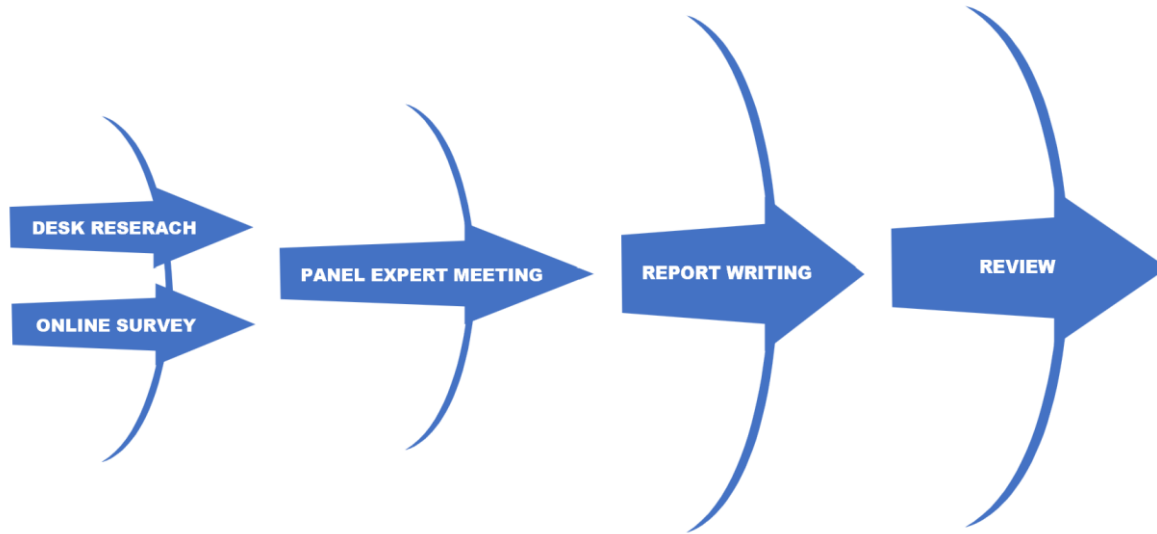
OMS mencakup semua entitas berikut:

1) organisasi non-pemerintah (fokus pada advokasi, pengawasan, atau penyediaan layanan), 2) gerakan sosial, 3) organisasi berbasis masyarakat dan organisasi berbasis agama, 4) serikat pekerja dan buruh, 5) kelompok perempuan, 6) kelompok pemuda, 7) pusat sumber daya dan organisasi pendukung perantara, 8) lembaga penelitian dan lembaga pemikir, 9) asosiasi profesional, 10) koperasi, dan kelompok pengguna sumber daya alam, 11) organisasi rekreasi, 12) lembaga budaya, 13) perusahaan sosial, dan gerakan informal, jaringan, dan kampanye.

# METODOLOGI-PROSES



# METODOLOGI-PROSES



## DESK RESEARCH

- Identifikasi kasus melalui penelusuran berita daring, laporan berbasis website OMS, hasil penelitian, dokumen kebijakan.
- Data hasil survei eksistensi dan kapasitas OMS yang dilakukan Konsil LSM bekerja sama dengan INFID di tahun 2023 dengan 509 responden OMS di seluruh Indonesia.

## ONLINE SURVEY

- Dirumuskan berdasarkan indikator yang juga merujuk langsung kepada poin-poin dalam keseluruhan tujuh dimensi penilaian
- Respons dari 69 responden dari 21 provinsi di Indonesia, meskipun form survei telah disebarluaskan kepada ribuan lembaga.

## PANEL EXPERT MEETING

- Penilaian dari Panel Ahli adalah rujukan utama Indeks Keberlanjutan OMS.
- Panel Ahli dipilih dari berbagai representasi unsur, bidang isu, disiplin, dan kecenderungan. Para ahli juga telah berpengalaman dalam dunia organisasi masyarakat sipil.
- Keragaman representasi memungkinkan saling konfirmasi antar Panel Ahli sehingga turut memperkuat objektivitas penilaian.

## Panel Ahli

1. Sulistri, Sekretaris Jenderal DPP Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau (FSB KAMIPARHO KSBSI). Sejak 1992 telah aktif di serikat buruh. Berpartisipasi dan menjadi ketua delegasi dalam International Labour Conference yang menetapkan konvensi ILO nomor 189.
2. Theresia Sri Endras Iswarini, Komisioner Komnas Perempuan. Sejak 1997 bekerja secara konsisten dalam isu perempuan.
3. Suhandoko Soetomo, Pengurus Remdec Swaprakarsa. Berpengalaman sebagai konsultan dan pendamping untuk capacity building dan community engagement.
4. Sunarman Sukamto, Tenaga Ahli Kedepuitan V Kantor Staf Presiden. Terlibat dalam isu-isu hak kaum disabilitas.
5. Slamet Raharjo, Ketua Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL Ina), organisasi jaringan nasional yang beranggotakan 91 organisasi di 29 provinsi. Menggeluti isu-isu hak minoritas gender dan HIV AIDS.
6. Jajang Jamaludin, Pemimpin Redaksi Koran Tempo. Pernah menjadi pengurus Aliansi Jurnalis Independen daerah dan pusat.
7. Rizky Argama, Direktur Eksekutif PSHK, editor Jurnal Hukum Jentera.
8. Iwan Misthohizzaman, Direktur INFID. Berpengalaman bekerja di banyak NGO dan lembaga donor.
9. M. Arifin Purwakananta, Deputi 1 Bidang Pengumpulan, BAZNAS. Sejak 1999 telah aktif di dunia NGO, terutama dalam isu penggalangan sumber daya dan fundraising. Saat ini pun masih menjadi konsultan untuk beberapa lembaga NGO.
10. Prayogo, Analis Kebijakan Ahli Madya, Subdit Kemitraan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri.

## REVIEWER:

Meuthia Ganie-Rochman  
Hurriyah  
Eko Komara

# DIMENSI

<b>Dimensi -1</b>	<b>Lingkungan Hukum</b> 6 Sub-Dimensi (pendaftaran, operasional (penegakan hukum), pelanggaran negara, perpajakan, akses sumber daya, kapasitas hukum lokal)
<b>Dimensi -2</b>	<b>Kapasitas Organisasi</b> 5 Sub-Dimensi (pembangunan konstituensi, perencanaan strategis, staffing, struktur pengelolaan internal, akses pada teknologi)
<b>Dimensi -3</b>	<b>Kemampuan Finansial</b> 6 Sub-Dimensi (diversifikasi, dukungan lokal, dukungan luar negeri, fundraising, penghasilan yang dibayar, sistem manajemen keuangan)
<b>Dimensi -4</b>	<b>Advokasi</b> 4 Sub-Dimensi (Kerjasama dg Pemerintah, inisiatif advokasi kebijakan, advokasi reformasi CSO, upaya lobby)
<b>Dimensi -5</b>	<b>Penyediaan Layanan</b> 5 Sub-Dimensi (barang dan jasa, respons ke masyarakat, konstituen, pemulihan biaya, pengakuan dan support pemerintah)
<b>Dimensi -6</b>	<b>Infrastruktur Sektoral</b> 5 Sub-Dimensi (Intermediary support org, local grant, koalisi CSO, pelatihan, kemitraan intersektoral)
<b>Dimensi -7</b>	<b>Citra publik</b> 5 Sub-Dimensi (cakupan media, persepsi masyarakat terhadap OMS, persepsi dunia usaha terhadap OMS, hubungan masyarakat, peraturan diri [akuntabilitas-transparansi])

# SKALA PENILAIAN

**0,1** Perubahan moderat

**0,2** Perubahan signifikan

**0,3** Perubahan dahsyat & sering tak terduga

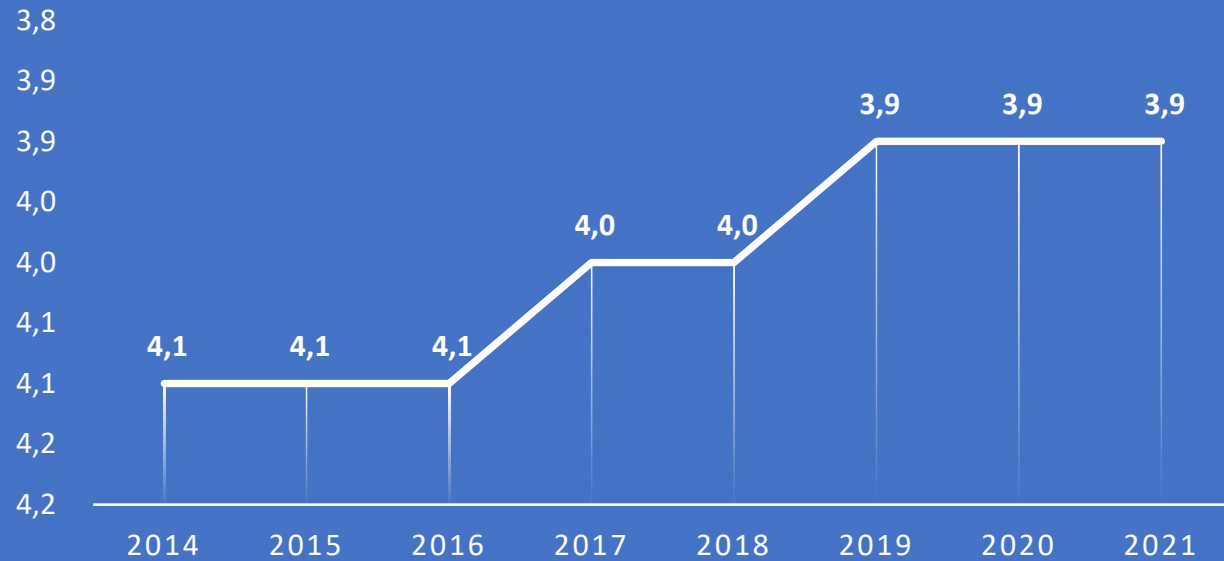
**KEBERLANJUTAN MENINGKAT : 1 - 3**

**KEBERLANJUTAN BERKEMBANG : 3,1 - 5**

**KEBERLANJUTAN TERHAMBAT : 5,1 - 7**

# TEMUAN UTAMA

SKOR INDEKS KEBERLANJUTAN OMS  
TAHUN 2014-2021



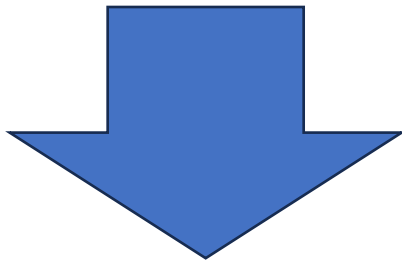
**KEBERLANJUTAN OMS  
SECARA KESELURUHAN: 3,9**

Tahun	2019	2020	2021	2023	
Lingkungan Hukum	4,4	4,6	4,7	4,8	●
Kapasitas Organisasi	3,9	3,8	3,7	3,7	
Kemampuan Finansial	4,3	4,4	4,5	4,5	
Advokasi	3,2	3,2	3,1	3,0	●
Penyediaan Layanan	3,6	3,5	3,4	3,3	●
Infrastruktur Sektoral	4,6	3,9	3,9	3,9	
Citra Publik	4,1	4,0	4,0	4,0	
	3,9	3,9	3,9	3,9	

# TEMUAN UTAMA

## DIMENSI 1. LINGKUNGAN HUKUM: 4.8

Tahun	2019	2020	2021	2023
Skor	4,4	4,6	4,7	4,8

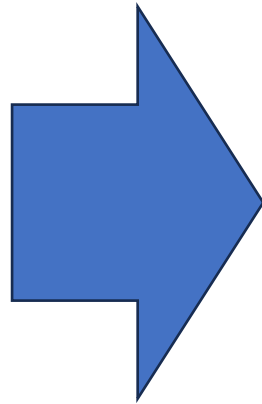


- ❑ Dampak beberapa kebijakan yang mempersempit ruang sipil: UU ITE, UU Cipta Kerja, Revisi UU KPK.
- ❑ Pembentukan tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan (Provinsi Lampung, Kabupaten Lima Puluh Kota).
- ❑ Kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi aktivis OMS mengalami penurunan akibat pendekatan represif yang dilakukan oleh aparat negara (terutama polisi), maupun penggunaan beragam metode pembatasan untuk membungkam kritik, mulai dari intimidasi, labeling, kriminalisasi, dst. Kriminalisasi, intimidasi, kekerasan terhadap OMS dan aktivis OMS
  - ❑ Amnesty Internasional juga mencatat terdapat 128 aktivis HAM yang ditangkap, 96 mengalami intimidasi/serangan fisik, 41 orang dikriminalisasi, 3 kasus percobaan pembunuhan, dan 1 kasus serangan terhadap lembaga pembela HAM.
  - ❑ Komnas Perempuan juga menyebutkan dalam Laporan Tahunan 2023, bahwa tercatat 7 laporan kekerasan terhadap Perempuan pembela HAM.
  - ❑ Kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan di Karimun Jawa & Budi Pego di Banyuwangi.
  - ❑ *Queer Advocacy Week* ASEAN batal diadakan di Jakarta pada 17-21 Juli 2023
- ❑ Homofobia mempengaruhi proses pendaftaran dan legalisasi OMS
- ❑ Rekognisi pemerintah melalui kebijakan pendanaan: BPD LH, DBH, Swakelola Tipe III.

# TEMUAN UTAMA

## DIMENSI 2. KAPASITAS ORGANISASI: 3.7

Tahun	2019	2020	2021	2023
Skor	3,9	3,8	3,7	3,7

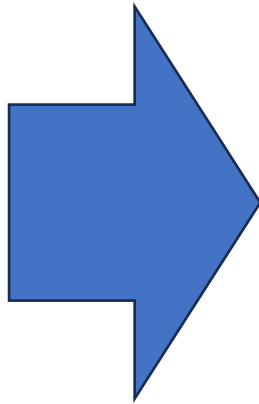


- ❑ Kelemahan utama: penguatan kapasitas OMS berbasis project.
- ❑ Banyak upaya lembaga *intermediary* dan forum-forum OMS untuk meningkatkan kapasitas OMS terutama mendukung pemulihan dan ketahanan paska Covid-19.
- ❑ Pengembangan program penguatan kapasitas OMS untuk diversifikasi pendanaan.
  - ❑ USAID-MADANI, Freedom Fund, Indonesia AIDS Coalition (IAC), Lokadaya, Lokanusa, Ford Foundation
- ❑ YAPPIKA: pelatihan internal tentang Emergency Fast Action and Support Team (EFAST) untuk YAPPIKA-ActionAid.
- ❑ INFID - Korea International Cooperation Agency (KOICA) menyelenggarakan Sekolah Online “Pelatihan Penggalangan Dana melalui Penyusunan Proposal”
- ❑ Dampak pelatihan-pelatihan, asistensi dari lembaga-lembaga *intermediary*, dan juga pembelajaran dari forum-forum OMS, kapasitas OMS dalam tata kelola program semakin membaik:
  - ❑ Survei Konsil LSM Indonesia dan INFID pada 2023, dari 509 OMS terdapat 455 OMS yang sudah memiliki visi misi organisasi; 497 OMS sudah memiliki rencana kerja; 483 OMS sudah memiliki rencana kerja tahunan; dan 425 OMS sudah memiliki rencana strategis (renstra).
- ❑ Penggunaan teknologi: 50% OMS yang mengikuti survei telah memiliki website Lembaga, lebih dari 70% memiliki akun Facebook

# TEMUAN UTAMA

## DIMENSI 3. KEMAMPUAN FINANSIAL: 4.5

Tahun	2019	2020	2021	2023
Skor	4,3	4,4	4,5	4,5

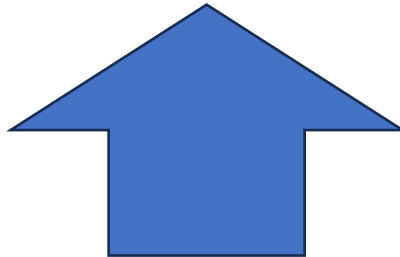


- ❑ Masih belum optimalnya upaya diversifikasi sumber pendanaan OMS.
- ❑ Penurunan dukungan pendanaan luar negeri pasca Indonesia bergabung dengan G20 dan peningkatan posisi ekonomi Indonesia
- ❑ Sumber pendanaan lokal potensial seperti dukungan dari perusahaan, lembaga filantropi, ataupun sumber dari dana pemerintah juga belum maksimal diakses oleh OMS.
- ❑ Covid-19 dan penurunan dukungan lembaga internasional menstimulasi diversifikasi pendanaan dan kreativitas OMS.
- ❑ Survei: 361 dari 509 OMS (71%) sudah mulai memiliki diversifikasi pendanaan.
- ❑ Inovasi diversifikasi pendanaan mulai berkembang:
  - ❑ Lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS telah terbuka untuk bekerjasama dengan OMS dalam mendukung kerjakerja kemanusiaan
  - ❑ Ika dan Komnas Perempuan mengadakan Give Back Sale (GBS) Pundi Perempuan, yakni penggalangan dana public melalui penjualan barang.
  - ❑ Kitabisa sudah bermitra dengan lebih dari 1000 OMS, 290 Rumah Sakit, 150 CSR, 7 juta vendor dan melibatkan lebih dari 1.900 influencers.
  - ❑ LBH dan YAPPIKA secara mandiri juga melakukan model crowdfunding melalui website organisasi masing-masing.
  - ❑ Kelompok serikat buruh/pekerja menginisiasi sistem iuran anggota dengan check out system, bekerja sama dengan Perusahaan untuk secara langsung menarik iuran dari gaji bulanan.
  - ❑ 33 organisasi lokal mitra USAID-MADANI, sampai dengan tahun 2023 berhasil mengembangkan alternatif sumber pendanaan local yang beragam, mulai dari skema Swakelola (pendanaan dari pemerintah), bisnis sosial, dan lainnya. Secara kolektif penggalangan alternatif sumber pendanaan lokal ini mencapai angka 17 milyar rupiah.
  - ❑ Kota Kita, organisasi nirlaba dengan keahlian perencanaan kota dan partisipasi warga dalam perancangan dan pengembangan kota (Panduan Model Pendanaan yang Berkelanjutan bagi OMS HIV AIDS di Indonesia). Sampai tahun 2022 Kota Kita memiliki 9 sumber pendanaan, yaitu; Private consulting, Research university, Private Foundation, International Public Corporation, Social Enterprise, International Research Organization, UN Agency, lembaga non-profit internasional dan nasional.
  - ❑ Yayasan Kusuma Buana (YKB), salah satu OMS yang berfokus pada masalah kesehatan dengan mengutamakan upaya preventif dan promosi, memiliki sumber pendanaan lebih dari empat sumber, mulai dari donor, sector swasta, fundraising, pemerintah, dan individu.

# TEMUAN UTAMA

## DIMENSI 4. ADVOKASI: 3.0

Tahun	2019	2020	2021	2023
Skor	3,2	3,2	3,1	3,0

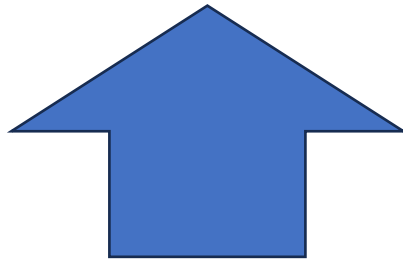


- ❑ Faktor utama: konsistensi OMS dalam kerja-kerja advokasi dan pendekatan yang progresif, dan keberhasilan-keberhasilan agenda advokasi di tingkat nasional maupun maupun lokal. Misalnya saja dalam kerja-kerja advokasi kebijakan, pendekatan lobi atau dialog antar pemangku kepentingan telah banyak dipilih sebagai strategi oleh OMS dan mencatatkan beberapa keberhasilan
- ❑ Menaiknya advokasi bisa diartikan masih banyaknya pelanggaran HAM dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, kondisi ruang sipil yang menyempit, dan kondisi-kondisi lainnya, sehingga OMS masih perlu bekerja keras untuk melakukan advokasi.
- ❑ Di tingkat nasional:
  - ❑ Dua Rancangan Undang-undang (RUU) yang telah menjadi agenda panjang koalisi OMS berhasil masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. RUU tersebut adalah (RUU PPRT) dan amandemen (UU ITE).
  - ❑ Advokasi pembentukan aturan turunan Undang-undang nomor 19/1961 tentang Pengadaan Uang dan Barang (PUB) dan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 8/2021 tentang Penyelenggaraan PUB, yang dilakukan oleh Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan, yang melibatkan lebih dari 100 OMS.
  - ❑ YLBHI dan Seknas WALHI mengkoordinasikan jaringan OMS nasional dan local dalam kasus penggusuran masyarakat adat di Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- ❑ Di Tingkat daerah:
  - ❑ Flower Aceh menggunakan pendekatan audiensi kepada Dinas Pendidikan Dayah terkait pentingnya pelatihan kesehatan bagi guru-guru di Dayah (pesantren).
  - ❑ Koalisi 18 LSM di Surabaya berhasil meyakinkan DPRD kota Surabaya untuk mengubah perda penyelenggaraan perlindungan anak menjadi Perda Inisiatif Kota Ramah Anak (child- friendly city initiatives-CFCI), dan melibatkan LSM dalam pansus perlindungan anak.
  - ❑ Forum Multi Stakeholder Jawa Timur berhasil mengadvokasi penandatanganan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur No 188/451/kpts/013/2022 pada 10 Juli 2022 tentang pengesahan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

# TEMUAN UTAMA

## DIMENSI 5. PENYEDIAAN LAYANAN: 3.3

Tahun	2019	2020	2021	2023
Skor	3,6	3,5	3,4	3,3

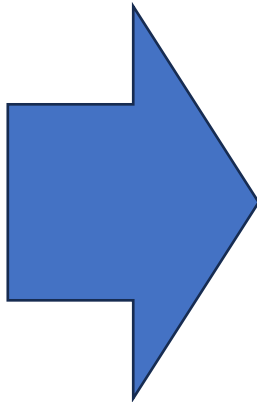


- ❑ Faktor utama: kondisi penyediaan layanan OMS saat ini berada pada titik inovatif dan inklusif.
- ❑ Inovasi-inovasi layanan:
  - ❑ Adopsi metode daring dalam penyediaan layanan. Metode daring dalam penyediaan layanan menjadikan layanan lebih efektif, karena dapat menyingkat ruang dan waktu serta berbiaya murah.
  - ❑ Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) melalui program kesehatan ibu dan anak MADANI mendampingi 12 organisasi di 12 kabupaten mendorong pelaksanaan empat solusi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), melalui Posyandu Remaja/Kampung Remaja Sehat, Desa Siaga KIBBL dan pendampingan ibu hamil, forum para pihak di tingkat desa dan pendampingan ibu hamil, dan kampung keluarga berkualitas.
  - ❑ Layanan bagi individu dengan disabilitas pun juga mengalami peningkatan, OMS melakukan advokasi untuk layanan pemerintah yang ramah disabilitas, seperti posyandu disabilitas, pendekatan inklusif dalam penanganan disabilitas mental, hingga terbentuknya Kelompok Kerja P5H Penyelenggaraan disabilitas mental.
  - ❑ Layanan HIV terus menguat, Pemerintah berkolaborasi dengan OMS untuk memberikan layanan, seperti menyediakan alat pencegahan, obat pencegah HIV pada populasi kunci dalam usaha mencegah kasus HIV baru, menyediakan tes HIV gratis, ARV dan membuat sistem untuk mencegah dan memonitor *lost to follow up*.
  - ❑ Upaya diversifikasi pendanaan dalam rangka keberlanjutan penyediaan layanan OMS dilakukan oleh banyak OMS dengan cara mengoptimalkan daya yang dimiliki oleh organisasi. Misalnya melalui *Credit Union* (CU) atau koperasi. Dukungan pendanaan yang diberikan *Credit Union* (CU) kepada PERSADA dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2023, dukungan CU kepada organisasi PERSADA sebesar 623.380.500, naik 4% dari tahun sebelumnya sebesar 600.085.000.

# TEMUAN UTAMA

## DIMENSI 6. INFRASTRUKTUR SEKTORAL: 3.9

Tahun	2019	2020	2021	2023
Skor	4,0	3,9	3,9	3,9

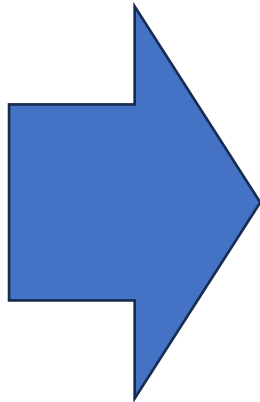


- ❑ Faktor utama: infrastruktur masyarakat sipil cukup berkembang, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan secara keseluruhan.
- ❑ Penguatan kapasitas OMS masih dilakukan secara konsisten oleh lembaga-lembaga:
  - ❑ Konsil LSM Indonesia (advokasi social contracting dan akuntabilitas), YAPPIKA (advokasi, kampanye, pengorganisasian warga, dan tata kelola organisasi), Penabulu (*Civil Society Resource Mobilization*), Lokadaya (mobilisasi sumber pendanaan). MADANI (resource mobilization), Yappika *Actionaid* memberikan pelatihan Result-Based Management (RBM) untuk Masyarakat adat di Papua. Yayasan Satunama merilis program pelatihan pengembangan kelembagaan OMS dengan tema “*Mobilization Support Game Changer: Graduation*”.
- ❑ Koalisi OMS baru yang terbentuk di tahun 2023: Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM, Koalisi Serius untuk Revisi UU ITE, Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan, Pokja Dana Abadi OMS, dan Koalisi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) untuk advokasi hak KBB. Di tingkat daerah, koalisi OMS dibangun untuk mendorong penanganan kasus, Di Kalimantan Tengah, koalisi LSM yang terdiri dari *WALHI Kalteng*, *Save Our Borneo (SOB)*, dan *LBH Palangkaraya* melaporkan empat perusahaan yang terlibat dalam kebakaran lahan di Kalimantan Tengah.
- ❑ Beberapa OMS Indonesia masih konsisten memberikan hibah kepada OMS lokal
  - ❑ Indonesia untuk Kemanusiaan (Ika) yang secara rutin membuka *call for proposal* dua kali setahun untuk isu layanan dan pendampingan korban kekerasan. Nusantara Fund yang merupakan inisiatif AMAN-KPA dan Walhi memberikan pendanaan kepada masyarakat adat dan komunitas lokal untuk mitigasi krisis iklim. Yayasan Penabulu menyediakan program hibah kecil (*Small Grant Programme/SGP*). Yayasan TIFA memberikan dukungan pendanaan bagi OMS pada isu prioritas HAM, tata kelola sumber daya alam, pendalaman inovasi, demokrasi dan gerakan sosial dan tata kelola digital. Yayasan Kurawal memberikan dukungan kepada individu dan organisasi dimulai sejak tahun 2019 dan tahun 2023 meluncurkan dana cepat tanggap darurat untuk keselamatan aktivis. KEHATI memberikan hibah untuk isu lingkungan hidup kepada OMS dengan lima klaster isu, yaitu: konservasi laut efektif, konservasi hutan dan satwa di Sumatera dan Kalimantan, *blue abadi fund*, serta pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan.

# TEMUAN UTAMA

## DIMENSI 7. CITRA PUBLIK: 4.0

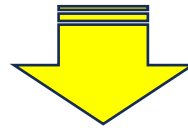
Tahun	2019	2020	2021	2023
Skor	4,1	4,0	4,0	4,0



- ❑ Citra publik OMS mengalami perkembangan, namun tidak signifikan dan masih pada tataran kepentingan wilayah kerja masing-masing.
- ❑ OMS di mata media masih mendapatkan tempat baik. Era konvergensi media dapat menjadi daya dukung dan daya jangkau untuk menaikkan berita seluas-luasnya.
- ❑ Pada sektor tertentu, persepsi pemerintah terhadap keterlibatan OMS dalam program-program kemitraan dengan pemerintah cukup baik.
  - ❑ Dalam penanganan Covid 19, pemerintah memberikan apresiasi atas dukungan dan kolaborasi berbagai pihak di antaranya adalah kepada 30 LSM dan 7 organisasi keagamaan.
  - ❑ KPAI memberikan penghargaan kepada LSM JARAK karena memiliki dedikasi tinggi terhadap penghapusan pekerja anak.
  - ❑ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penghargaan kepada 3 LSM.
  - ❑ Kota Cirebon, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Tabalong yang memberikan penghargaan kepada OMS yang aktif mengawal Pembangunan daerah.
  - ❑ KPPPA mengeluarkan SK Nomor 160 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Pencapaian Kinerja melalui Strategi Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat.
- ❑ Citra publik OMS melalui penghargaan OMS terhadap kinerja pemerintah.
  - ❑ LSM Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) dan LSM Pemerhati Situasi Terkini (PST) yang memberikan penghargaan kepada kinerja Kejari Kota Palembang dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
  - ❑ Di Minahasa, Forum Rakyat Anti Korupsi (FRAKO) yang terdiri dari beberapa LSM anti korupsi memberikan penghargaan kepada Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stevani Kumendong atas kinerja dalam pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Minahasa.

# PENUTUP

- ❑ Ruang sipil menyempit akibat kebijakan negara, tindakan kekerasan, dan diskriminasi aparat negara terhadap OMS atau aktivis OMS.
- ❑ Advokasi yang dilakukan OMS meningkat.
- ❑ Pelayanan kepada masyarakat dan konsituten meningkat karena munculnya inovasi-inovasi layanan. Covid-19 dan krisis menstimulai kreativitas OMS.
- ❑ Diversifikasi pendanaan mulai dilakukan, namun belum menjawab kebutuhan eksistensi dan keberlanjutan OMS



## RESILIENSI OMS ?